

LAPORAN

MONITORING PELAYANAN INFORMASI BULAN JANUARI TAHUN 2017



**SUB BAGIAN HUMAS dan TATA USAHA KALAN
2017**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Kata Pengantar

Salah satu kegiatan Sub Bagian Humas dan Tata Usaha adalah menerima dan memberikan layanan informasi terhadap pengaduan masyarakat ataupun permintaan informasi yang masuk. Permintaan maupun pengaduan yang masuk dari masyarakat merupakan bentuk apresiasi masyarakat terhadap keberadaan BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Opini publik pun dapat terjadi dari hal tersebut, bagaimana BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menanganinya dan menyelesaikan pengaduan masyarakat akan dinilai oleh pihak-pihak di luar BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pengaduan maupun informasi dari masyarakat mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi tumpuan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabilitas dan transparan yang bersih, bebas dari KKN. Pengaduan ini bisa disampaikan secara langsung, surat maupun melalui email. Isi dari pada pengaduan masyarakat ini bermacam-macam, dimana mayoritas menghendaki agar segala bentuk kecurangan yang terjadi yang menyangkut pengelolaan keuangan negara haruslah dibenahi.

Untuk mendapatkan masukan dan informasi tentang segala sesuatu yang dinformasikan oleh masyarakat melalui pengaduan masyarakat, dibuatlah monitoring yang memuat informasi tersebut. Hasil monitoring ini dapat menjadi masukan dan informasi bagi siapa saja yang berkepentingan.

Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengetahui harapan masyarakat akan keberadaan BPK RI dalam menjalankan kegiatan, tugas, dan fungsinya sebagai lembaga pemeriksa yang transparan dan akuntabel.

Mataram, Februari 2017

Ketua PIK



Ida Bagus Ketut Wisnu
NIP. 196711291994031002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI	3
I PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN SALURAN INFORMASI	4
II PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN KATEGORI	5
III PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI YANG DITANGGAPI (KESELURUHAN)	6
IV REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI	7

**RESUME ANALISIS PELAYANAN INFORMASI
DI BPK PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BULAN JANUARI TAHUN 2017**

No.	KLASIFIKASI		URAYAN
1.	Kategori		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	2
	b) Pengaduan Masyarakat	:	1
	c) Komplain Informasi	:	0
2.	Saluran		
	a) Website	:	0
	b) Surat/Email	:	3
	c) Langsung	:	
3.	Leading Topik		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
	b) Pengaduan Masyarakat	:	Pembangunan gedung baru DPRD NTB
	c) Komplain Informasi	:	-
4.	Topik yang perlu mendapat perhatian		
	a) Permohonan / Penyampaian Informasi	:	-
	b) Pengaduan Masyarakat	:	-
	c) Komplain Informasi	:	-

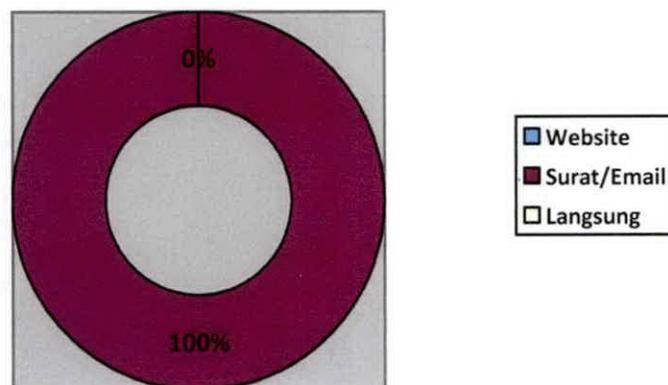
I. PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN SALURAN INFORMASI

Pada Bulan Januari Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi berdasarkan saluran website, surat atau e-mail, maupun datang langsung adalah sebagai berikut:

No.	Saluran	Jumlah	Persentase
1	Website	0	0%
2	Surat/Email	3	100%
3	Langsung	0	0%
	JUMLAH	3	100%

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat permintaan informasi/pengaduan masyarakat/komplain informasi yang masuk melalui surat/email sebanyak 100%.

Gambar 1.1 Persentase Pelayanan Informasi Yang Masuk Berdasarkan Saluran



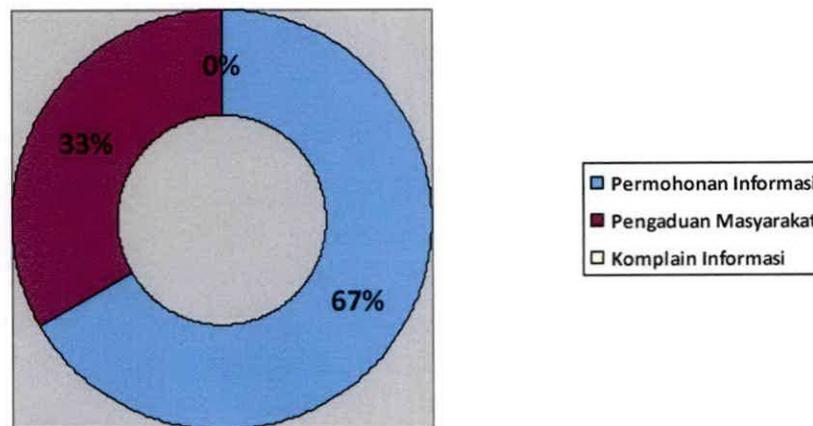
II. PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI BERDASARKAN JENIS INFORMASI

Pada Bulan Januari Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang masuk berdasarkan kategori permohonan/penyampaian informasi (PI), pengaduan masyarakat (PM), dan komplain informasi (KI), adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah	Persentase
1	Permohonan/ Penyampaian Informasi	2	66.67%
2	Pengaduan Masyarakat	1	33.33%
3	Komplain Informasi	0	0%
2	JUMLAH	3	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 3 pelayanan informasi, 2 diantaranya merupakan permohonan/permintaan informasi dan 1 pengaduan masyarakat.

Gambar 2.1 Persentase Pelayanan Informasi Berdasarkan Kategori



III. PERSENTASE PELAYANAN INFORMASI YANG DITANGGAPI

Pada Bulan Januari Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi adalah 66.67%. Masih terdapat 1 permohonan/penyampaian informasi yang belum ditanggapi.

IV. REKAPITULASI PELAYANAN INFORMASI

Pelayanan Informasi yang Ditanggapi

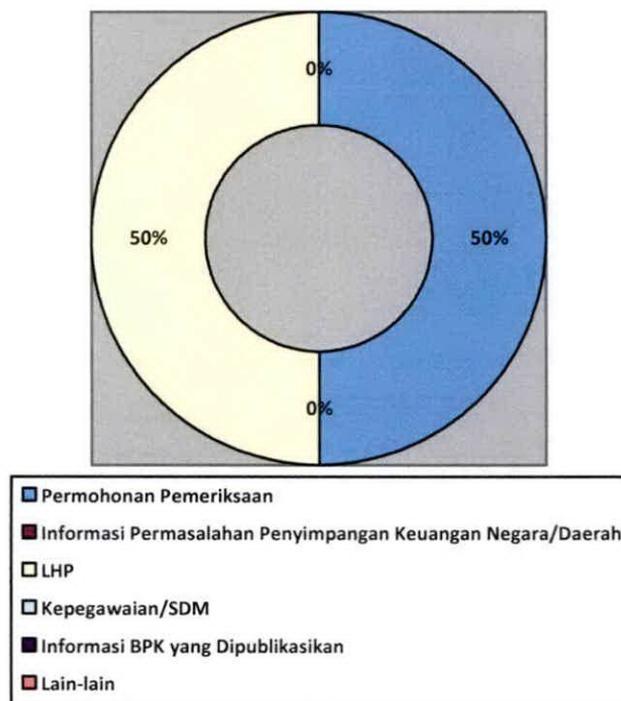
Pada Bulan Januari Tahun 2017, analisis kuantitatif pelayanan informasi di BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditanggapi adalah sebagai berikut:

a. Persentase Pelayanan Informasi yang Ditanggapi

Pada Bulan Januari Tahun 2017, terdapat 2 permohonan/penyampaian informasi dan 1 pengaduan masyarakat yang masuk, tetapi baru 1 permohonan/penyampaian informasi dan 1 pengaduan masyarakat yang sudah ditanggapi. Adapun topik permohonan/penyampaian informasi dan pengaduan masyarakat yang sudah ditanggapi tersebut dikategorikan sebagai berikut:

No.	Topik	Jumlah	Persentase
1	Permohonan Pemeriksaan	1	50%
2	Informasi Permasalahan Penyimpangan Keuangan Negara/Daerah	0	0%
3	Laporan Hasil Pemeriksaan	1	50%
4	Kepegawaian/ SDM	0	0%
5	Informasi BPK Yang Dipublikasikan	0	0
6	Lain-lain	0	0%
	JUMLAH	2	100%

Gambar 4.2 Persentase Topik Layanan Informasi



b. Rincian Layanan Informasi
- Permohonan/Penyampaian Informasi

NO	Waktu			Nama	Instansi	Jabatan	Permintaan Informasi	Tujuan Penggunaan Informasi	Tindak Lanjut
	Permintaan	Jawab/Selesai	Waktu (hari)						
1.	25 Januari 2017			Taukhid	Ditjen Perbendaharaan Kemil. Dan. NFP	Kepala Karwil	LHP Semester II Tahun 2015 atau LHP LKPD TA 2015 11. Lembaran di	penyusunan statistik keuangan pemerintah	belum terpenuhi
2	30 Januari 2017	30 Januari 2017	1 hari	Khairul Anwar	Kejaksaan Negeri Lombok Tengah	Staf Pidana Khusus	LHP PDDT Belanja Kab. Lombok Tengah TA 2016 dan LHP LKPD Kab. Lombok Tengah TA 2015	untuk penyidikan	sudah terpenuhi

- Pengaduan Masyarakat

NO	Jenis Aduan Masyarakat	Pemberi Aduan	Saluran Pengaduan	Ditindaklanjuti	Belum Dapat Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Keterangan
1.	Permintaan Pemeriksaan dugaan korupsi pembangunan gedung baru kantor DPRD Prov NTB	Kapak NTB	Surat	√	-	-	Sebagai bahan pemeriksaan